KOM
PRO
MI

Jalur Ideal Menuju Demokrasi

Thomas Meyer

FRIEDRICH
EBERT
STIFTUNG

Kompromi

Jalur Ideal Menuju Demokrasi

Thomas Meyer

Kompromi
Jalur Ideal Menuju Demokrasi

Penulis: Prof. Dr. Thomas Meyer

Diterbitkan oleh:
Friedrich-Ebert-Stiftung (FES)
Kantor Perwakilan Indonesia
Jalan Kemang Selatan II No. 2A
Jakarta 12730/Indonesia
Tel.: +62-21-7193711
Fax:+62-21-71791358
Email: info@fes.or.id
Website: www.fes.or.id

Cetakan Pertama, Juli 2008
Cetakan Kedua, Desember 2009
Cetakan Ketiga, Mei 2012

Daftar Isi

Kompromi

Jalur Ideal Menuju Demokrasi

Pendahuluan

Sejarah di semua demokrasi menunjukan bahwa lembaga-lembaga yang bagus, dapat diterima, berfungsi dengan baik, dan juga dapat menyesuaikan diri dengan kondisi khusus yang ada di suatu negara merupakan faktor penting untuk mencapai kesuksesan. Namun demikian, hal lain yang sama pentingnya dalam menentukan kesuksesan dan kegagalan demokrasi adalah piranti lunak, seperti budaya politik dimana lembaga tersebut berada. Faktor ini terutama melibatkan sikap, kebiasaan, tindakan dan nilai-nilai serta keyakinan dan harapan yang dimiliki dan mengarahkan masyarakat dan elit politik.

Ketika terjadi kontradiksi yang semakin mendalam antara semangat dan kebiasaan lembaga elit politik dengan mayoritas masyarakat, maka lembaga-lembaga demokratis terbaik tidak akan berkesempatan untuk mengembangkan potensi mereka secara penuh di jangka panjang, ataupun memperoleh

kredibilitas yang diperlukan untuk diakui keabsahannya untuk mewakili kepentingan seluruh pihak terkait.

Kondisi yang paling penting untuk menjamin kerja dan kinerja lembaga-lembaga demokratis secara layak dan berkesinambungan di dalam budaya politik adalah kepercayaan dan kemampuan untuk mencapai kompromi yang cerdas. Kedua kondisi ini, kepercayaan dan kemampuan untuk mencapai kompromi yang cerdas, saling melengkapi dan tumbuh bersama satu dengan yang lain. Ketika kondisi ini sudah cukup kuat, masyarakat dapat memahami bahwa kepentingan seluruh individu di dalam demokrasi harus dipertimbangkan secara adil – dan ini adalah makna demokrasi yang sebenarnya. Dan apabila hampir semua warga negara memiliki pengalaman ini, demokrasi akan memiliki dasar yang solid, dan nilai intrinsik terbaiknya dapat dirasakan, dan kesediaan untuk berkontribusi demi melestarikan demokrasi ini akan tumbuh dengan kesadaran kita untuk berkompromi.

Demokrasi bukanlah sebuah mesin yang komponen utamanya terdiri dari lembaga-lembaga. Demokrasi terutama dapat hidup dari semangat dan kebiasaan warga negara dan kelompok elitnya.

Apabila prinsip mayoritas ini disalahgunakan untuk memenangkan kepentingan pribadi kelompok mayoritas melawan bagian masyarakat lainnya, akan mengakibatkan

ketidakpercayaan berkembang dan negara akan dilihat hanya sebagai mangsa di mata sekelompok orang tertentu untuk menghasilkan keuntungan bagi kelompok mereka dengan mengorbankan kelompok lain.

Kompromi disebut sebagai “sekolah demokrasi lanjutan.” Pengalaman dari seluruh demokrasi menun-jukan, bahwa kompromi berhak menerima gelar kehormatan ini. Dalam menjalankan kompromi ini, peserta belajar bagaimana menumbuhkan rasa percaya dan memanfaatkan lembaga-lembaga demokrasi dengan benar, dimana perlu membuktikan kegunaan mereka untuk semua pihak di masyarakat.

Tentu saja, kompromi yang cerdas selalu dibutuhkan untuk menjaga kepentingan pribadi peserta di jangka panjang dan dengan demikian selalu mengingat prinsip-prinsip yang mereka akui di depan publik. Bertentangan dengan konsep di atas, “kompromi setengah hati“ akan mengkhianati prinsip-prinsip ini karena akan memungkinkan satu pihak untuk meraup keuntungan pribadi di jangka pendek.

Budaya kompromi yang cerdas telah terbukti menjadi salah satu syarat untuk demokrasi yang sukses dan terpercaya.

1. Kompromi – Sekolah Demokrasi Lanjutan

Definisi “kompromi“ dalam kamus menekankan bahwa hal ini merupakan tindakan yang masuk akal dan diperlukan apabila tidak satupun pihak yang berpartisipasi memiliki cukup kekuatan untuk mengejar sasaran pribadinya secara pasti dan utuh. Namun demikian, di dalam konteks politik, fungsi lain dari kompromi adalah pengambilan keputusan. Kompromi memiliki fungsi produktif untuk mengatasi konflik ketika penerapan kepentingan dari pihak yang lebih kuat tidak memberikan solusi jangka panjang. Hal ini berarti keputusan yang diambil secara sepihak sering kali dipertanyakan dan dengan demikian menjadi tidak stabil. Di dalam kasus seperti ini, solusi yang dipaksakan sering kali hanya dipertahankan oleh pihak yang dominan dengan biaya tinggi, dan di sebagian besar kasus, ini hanya bertahan dalam periode waktu yang terbatas sampai terjadinya perubahan perimbangan kekuasaan.

Kompromi sering kali mengurangi biaya untuk mempertahankan kepentingan suatu pihak.

Di dalam kompromi, dua peserta atau lebih sepakat untuk menghilangkan hak mereka dalam memaksakan seluruh kepentingan mereka sendiri, sehingga seluruh peserta dapat menyadari sasaran politik mereka sebanyak mungkin. Hal yang sama pentingnya adalah terjadi pertukaran manfaat dengan cara

yang diterima oleh semua pihak, dan hasil yang diperoleh secara bersama-sama ini akan memperoleh legitimasi di mata seluruh peserta dan membawa stabilitas.

Kompromi yang sukses dengan demikian akan mungkin diraih oleh semua peserta – bahkan untuk pihak-pihak yang tidak terlibat langsung – dapat merasakan pertimbangan, kerjasama yang adil, mempertimbangkan banyak kepentingan di dalam proses pengambilan keputusan bersama, dan menghargai alasan yang baik untuk keseluruhan hasil politik yang jauh lebih bermakna daripada sekedar penggunaan kekuatan belaka.

Kompromi sebagai situasi saling memberi dan menerima sambil menyatukan kepentingan masyarakat, dan merupakan proses timbal balik keuntungan dan kerugian yang adil, dimana tidak ada peserta yang berusaha mencapai sasaran mereka sendiri dengan segala upaya tanpa mempertimbangkan kepentingan dan sasaran pihak-pihak lain, dan disini tidak ada pihak yang kalah, dengan demikian dapat menciptakan rasa percaya karena satu sama lain saling bergantung dan bersikap adil serta nilai saling mempertimbangkan. Kompromi mencerminkan pemikiran bahwa sasaran dan kepentingan suatu pihak akan sulit untuk direalisasikan sepenuhnya, namun harus selalu dinegosiasikan dengan kepentingan, nilai dan sasaran pihak-pihak lain karena mereka juga memiliki pembenaran-pembenaran atas kepentingan mereka.

Mempertimbangkan sebanyak mungkin kepentingan dan nilai merupakan sebuah sasaran penting dalam demokrasi.

Kemampuan untuk menerima sebanyak mungkin kepentingan yang sah yang terwakili di masyarakat lalu mengintegrasikannya ke dalam proses pembuatan dan pengambilan keputusan politik merupakan suatu prinsip penting dalam demokrasi yang kita pahami. Untuk alasan-alasan ini, kerjasama atau kolaborasi dan realisasi kompromi yang cerdas akan mengembangkan sikap, kebiasaan dan keterampilan yang dibutuhkan demokrasi agar dapat berfungsi dan mendapatkan pengakuan dari seluruh warga negara. Dengan melihat konsep ini, maka budaya kompromi merupakan sekolah demokrasi lanjutan.

Kompromi melatih keterampilan yang diperlukan dalam demokrasi.

2. Pluralisme – Dasar dari Kemerdekaan dan Demokrasi

Di dalam realitas sosial dan politik, akan selalu terdapat perbedaan dalam memahami kepentingan suatu pihak, nilai-nilai yang dikejar, keinginan dan harapan yang diperoleh dari perpolitikan ideal, terutama apabila tekanan yang diberikan tidak berjalan secara artifisial dan dipaksakan. Pluralisme hadir dengan menerima perbedaan-perbedaan ini dan berusaha menyusun struktur politik dengan cara yang sama produktifnya untuk setiap kelompok sosial dan keseluruhan masyarakat. Masyarakat sosial tidak pernah homogen di seluruh bagiannya, ataupun bersatu tanpa ada perbedaan di semua bagian-bagian penting tanpa menggunakan kekerasan.

Dengan demikian, pluralisme sosial merupakan ekspresi kebebasan sebagai bentuk manifestasi beragam kepentingan, nilai dan perspektif.

Pluralisme politik, adalah organisasi yang terdiri berbagai kepentingan dan nilai-nilai dengan tujuan untuk berpartisipasi di dalam proses politik sebagai bagian dari demokrasi. Demokrasi hidup dari pluralisme dan merupakan bentuk yang sewajarnya dari pluralisme yang terlaksana secara produktif. Ciri khas dasar yang membuat demokrasi mungkin dan perlu dilakukan pada saat yang bersamaan adalah adanya berbagai kepentingan dan sasaran manusia.

Pluralisme dalam praktiknya selalu berupa pluralisme kelompok. Pegawai, pengusaha, penduduk desa, pedagang,

masyarakat dari wilayah yang sama, orang-orang dengan keyakinan agama yang sama atau mentalitas politik dan budaya yang sama bergabung bersama untuk mencapai tujuan bersama secara lebih efektif di dalam proses politik di negara mereka. Pluralisme politik selalu berupa pluralisme kelompok yang terdiri dari berbagai klub, asosiasi dan partai politik.

Inilah mengapa demokrasi khususnya membutuhkan situasi-situasi, aturan-aturan dan prosedur tersebut, dimana semua ini sesuai dengan asal muasal pluralisme di masyarakat, dengan menyediakan sarana ekspresi politik, dan memungkinkan mereka untuk mengembangkan proses pengambilan keputusan yang sesuai dan diperlukan. Kebebasan untuk membentuk klub dan asosiasi, kebebasan untuk mengatur dan menjalankan kegiatan di kalangan masyarakat sipil, dan untuk membentuk partai politik di dalam sistem yang multi partai merupakan ciri khas demokrasi.

Perbedaan sosial dapat mengarah pada konflik politik ketika ada aturan yang berlaku yang tidak memuaskan berbagai kepentingan dan nilai secara adil. Konflik merupakan situasi normal di dalam kehidupan politik demokrasi.

Konflik kepentingan dan nilai yang dilakukan secara terbuka merupakan bagian dari konsensus tentang nilai-nilai fundamental dan proses demokratis. Hal ini diharapkan dapat dan harus menghasilkan persatuan yang diperlukan.

Otoritas politik yang sejak awal menyatakan ingin menciptakan harmoni dan mencegah konflik sebenarnya berusaha mengesampingkan kepentingan-kepentingan, organisasi-organisasi dan partai-partai yang tidak sama dari proses pengembangan tujuan yang demokratis. Hal ini hampir selalu hanya melayani kepentingan salah satu dari pihak yang berkonflik berpura-pura mewakili kepentingan umum.

Seluruh peserta dalam demokrasi telah dinasihati untuk memilih cara sendiri dalam mencapai kepentingan mereka di dalam konflik politik. Tidak ada satu orang pun yang dijamin tidak akan terlibat lagi dalam konflik berikutnya dan akan bergantung pada perlindungan kelompok lain yang lebih kuat. Pengalaman bersama untuk menyelesaikan konflik politik secara damai dapat nantinya mempersatukan peserta, namun hanya apabila konsensus-konsensus lain terlaksana seperti prosedur yang adil, batas-batas resolusi konflik, dan hasil akhir kompromi. Dengan demikian, *budaya politik* untuk menyeimbangkan konsensus dan konflik, kemampuan untuk mencapai kompromi yang baik, merupakan hal yang esensial dalam demokrasi.

Hampir semua orang merupakan bagian dari kelompok-kelompok sosial yang berbeda-beda. Sebagai contoh, seorang petani dari daerah tertentu menganut agama tertentu; sementara orang lain adalah seorang pengusaha kecil dari wilayah yang sama dan menganut agama yang sama dan mengikuti organisasi keagamaan yang sama dengan si petani. Dengan demikian, meskipun secara ekonomi dan sosial kedua orang ini memiliki kepentingan yang berbeda atau bahkan bertentangan; namun

secara kewilayahan dan agama mereka memiliki kepentingan yang sama. Dalam prakteknya, tumpang tindih kepentingan seperti ini hampir selalu terjadi. Hal ini dapat membantu untuk membatasi pertentangan kepentingan dan mencegah perpecahan di masyarakat.

> **Tumpang tindih kepentingan hampir selalu menjadi dasar yang baik untuk terlaksananya kompromi yang adil.**

Dengan demikian, menyadari adanya tumpang tindih sebagian kepentingan dan menghasilkan konsensus demokratis di atas semua konflik pluralistis merupakan prasyarat penting dalam pluralisme politik agar dapat mengarah kepada inovasi dan kepercayaan serta tidak antipati ataupun menghambat pembangunan.

Kebebasan untuk membentuk asosiasi sebagai bagian dari demokrasi di dalam negara diatur oleh hukum. Hal ini merupakan bagian dari hak sipil. Semua warga negara harus memiliki kesempatan untuk mempertahankan kepentingan sosial, kultural, kewilayahan dan ekonomi mereka dan bergabung dalam suatu asosiasi atau organisasi.

Pengaruh yang paling penting dalam ekonomi pasar biasanya adalah asosiasi pekerja, seperti serikat pekerja, serikat buruh dan asosiasi petani. Di satu sisi, mereka memiliki tugas untuk mengatasi kepentingan anggota diantara mereka sendiri, misalnya serikat buruh dan asosiasi pemilik perusahaan

menentukan kesepakatan kolektif dan kondisi kerja. Lebih daripada itu, seluruh kelompok dan asosiasi berjuang untuk memiliki pengaruh politik agar dapat memperbaiki kondisi sosial dan politik untuk kepentingan kehidupan dan pekerjaan anggota mereka. Ini merupakan fungsi lobi yang dimiliki oleh asosiasi. Asosiasi pemilik perusahaan misalnya, secara terus menerus berusaha mempengaruhi undang-undang, dari undang-undang perpajakan sampai dengan undang-undang ketenagakerjaan yang berdampak kepada mereka. Serikat buruh tidak hanya tertarik kepada undang-undang yang berhubungan dengan ekonomi atau sosial saja, tetapi juga bidang-bidang lain dari kebijakan fiskal sampai kebijakan pendidikan tergantung pada dampak yang akan dirasakan oleh anggota mereka. Dari sudut pandang ini, asosiasi atau organisasi ekonomi dan sosial selalu memiliki dimensi politik dalam pekerjaan mereka. Hal ini sah dan wajar di dalam demokrasi selama mereka tidak berniat untuk merubah total posisi kekuasaan ekonomi dan sosial mereka menjadi kekuasaan politik yang ditentukan sendiri melampaui keinginan mayoritas masyarakat.

Asosiasi memiliki empat instrumen yang sah untuk mempengaruhi politik:

1. Mereka dapat meminta anggotanya untuk memilih dalam pemilu dengan pertimbangan tertentu.
2. Mereka dapat mempengaruhi opini publik melalui kegiatan kehumasan mereka.
3. Mereka dapat mempengaruhi otoritas yang berwenang dan pemerintah selaku organisasi pelobi, dan

4. Mereka dapat mempengaruhi sasaran dan langkah-langkah yang dilakukan partai politik melalui afiliasi anggota mereka dengan partai tersebut dan melalui negosiasi di luar.

Demokrasi hadir untuk mengatasi perbedaan-perbedaan kepentingan secara produktif dan adil.

Dari sudut pandang demokrasi, hal ini tidak hanya sah namun juga bermanfaat. Ini dapat berfungsi sebagai kebijakan masyarakat dalam mempertimbangkan dan menyeimbangkan berbagai kepentingan selama asosiasi-asosiasi tersebut tidak berusaha menggunakan pengaruh mereka melalui penggunaan kekuasaan sebagai penghambat masyarakat atau menggunakan kekuasaan mereka sebagai upaya pemerasan.

Asosiasi dan kelompok juga harus dikelola secara demokratis dari dalam sehingga dapat benar-benar mewakili kepentingan anggota mereka dan tidak hanya sekedar berfungsi sebagai instrumen kekuasaan di tangan beberapa pemimpin kelompok.

3. Empat Cara Menghadapi Konflik Kepentingan

Kita mengharapkan agar semua pemikiran, niat dan kepentingan yang ada di masyarakat disampaikan secara jelas dan benar karena hanya dengan demikian kita dimungkinkan untuk menghadapi mereka secara terbuka dan adil, dan mengakomodir semua orang dalam proses politik sehingga tidak ada satu orang pun yang dapat merasa dikucilkan atau dijauhi, dan tidak menjauhkan masyarakat dari komunitas politik.

Inti dari politik, yaitu seni berdemokrasi, adalah untuk memberikan kesempatan bersatunya aksi-aksi bersama yang lahir dari beragam kepentingan dan nilai, yang dapat diterima oleh semua orang sebagai suatu hal yang sah.

Hal ini hanya dapat diharapkan apabila proses politik, yang melahirkan persatuan aksi-aksi dari sejumlah kepentingan dan nilai, dianggap sah dan adil oleh seluruh peserta. Ini adalah sasaran dari demokrasi, yaitu memastikan proses tersebut tersedia, memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang untuk dipertimbangkan kepentingannya. Dengan cara ini, beragam perspektif yang dimiliki peserta dapat berkembang menjadi aksi politik yang diakui oleh negara. Hal ini secara jelas menunjukan bahwa individu-individu yang bertanggungjawab

di dalam pemerintahan harus melaksanakan aturan-aturan demokrasi secara bertanggungjawab.

Pada prinsipnya, ada empat strategi politik yang tersedia untuk menghadapi perbedaan kepentingan:

1. ***Otoriter (Authoritarianism):*** Hal ini melibatkan proses dimana sejumlah kepentingan dijalankan melalui penggunaan kekuatan dan kekuasaan negara dengan mengorbankan pihal lain tanpa toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada. Proses diktator ini bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.
2. ***Membangun Konsensus:*** Hal ini melibatkan proses yang mengharapkan tercapainya kesepakatan antara semua pihak melalui pertukaran argumen yang baik. Membangun konsensus harus selalu diperjuangkan. Hal ini membutuhkan keterlibatan dan waktu dalam jumlah besar serta partisipasi aktif dari seluruh peserta selama proses diskusi. Dengan demikian, cara ini tidak selamanya dapat selalu dilakukan karena besarnya jumlah kepentingan yang terlibat dan alokasi waktu yang dibutuhkan selama proses berlangsung.
3. ***Keputusan mayoritas secara ketat:*** Dalam keputusan mayoritas, kelompok mayoritas yang ada, baik di dalam masyarakat secara umum atau badan pengambilan keputusan, menggunakan superioritas jumlah yang mereka miliki untuk dapat melaksanakan secara penuh kepentingannya terhadap kelompok minoritas. Hal ini dapat terjadi dengan cara yang tidak mengakomodir kepentingan monirotas sama sekali. Dalam beberapa kasus, hal ini mungkin tidak

terhindarkan karena sifat dan topik dari kepentingan yang terlibat. Hal ini hampir selalu problematis. Begitu kelompok minoritas berubah menjadi mayoritas di dalam kondisi demokratis, maka semua hal yang berhasil dimenangkan hari ini akan hilang. Kelompok minoritas, yang diperlakukan tanpa kompromi, kemungkinan akan melakukan cara yang sama ketika mereka berkuasa. Keputusan mayoritas tanpa kompromi sering kali menciptakan stabilitas dan keamanan jangka panjang.

4. ***Kompromi:*** Cara ini melibatkan proses negosiasi yang membuat semua pihak menyadari bahwa pencapaian nilai dan kepentingannya secara penuh tidak mungkin dilakukan atau bukanlah suatu langkah yang cerdas. Cara ini didasari atas suatu pandangan bahwa segala bentuk kesepakatan yang wajar terhadap permintaan satu pihak dapat dilakukan untuk dapat mencapai bagian-bagian lain yang lebih penting dari kepentingan dan nilai-nilai kita di jangka panjang.

Kesimpulan: proses pengambilan keputusan yang otoriter jelas-jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Hal ini tidak hanya tidak dapat diterima atas dasar alasan-alasan normatif, tetapi ini juga menjadi strategi aksi politik yang dapat mengakibatkan destabilisasi karena kepemimpinan otoriter selalu melahirkan resistensi dan disintegrasi atas sistem yang ada.

Strategi-strategi untuk mencapai konsensus selalu menjadi hal yang menarik, namun sering kali hanya praktis dilakukan dalam batasan-batasan tertentu dan apabila terkait dengan

pertanyaan-pertanyaan mendasar yang ada di masyarakat, termasuk harus mempertimbangkan jumlah waktu yang diperlukan dan kesulitan dalam mengatur proses diskusi untuk seluruh bagian masyarakat.

Keputusan-keputusan mayoritas tanpa kompromi, dan tidak mengakomodir kepentingan minoritas, sering kali tidak menjadi suatu proses politik yang cerdas terutama karena dua alasan berikut: di satu sisi, strategi mayoritas yang dominan mengucilkan kelompok-kelompok penting di masyarakat dari demokrasi, terutama, ketika hal itu melibatkan nilai-nilai dan tujuan yang penting. Dengan demikian, hal tersebut merendahkan fondasi politik dan budaya dari demokrasi itu sendiri, meskipun dari luar tampak seperti suatu pendekatan yang formal. Hal tersebut bertentangan dengan persepsi sebagian besar masyarakat bahwa pada akhirnya proses pengambilan keputusan yang demokratis bertujuan melayani kepentingan semua orang.

Alasan kedua adalah: keputusan-keputusan yang diambil tanpa kompromi sering kali tidak stabil karena peserta, yang tidak diikutsertakan dalam pertimbangan, sering kali secara aktif mendorong terjadinya perubahan. Dengan demikian, sebagian besar keputusan-keputusan ini tidak diambil untuk kepentingan jangka panjang dari pihak yang berkuasa.

Dengan demikian, prinsip demokrasi mayoritas harus mencantumkan strategi kompromi yang adil dan cerdas. Mengintegrasikan sebanyak mungkin kepentingan kelompok minoritas di dalam keputusan selalu menjadi strategi yang cerdas untuk menstabilisasikan kepercayaan perwakilan mereka dalam

demokrasi, dan untuk memperbaiki konsistensi keputusan yang sedang dibuat saat ini.

> Kompromi merupakan proses pembuatan keputusan yang dapat memungkinkan terjadinya stabilitas jangka panjang dan keamanan demokrasi secara bersamaan. Kompromi adalah kunci dari budaya demokrasi.

4. Demokrasi – Strategi untuk Resolusi Konflik yang Adil

Dalam perjuangan untuk menegakan demokrasi dan dalam kasus-kasus dimana negara Non Barat mengalami kegagalan, musuh-musuh demokrasi sering kali mengajukan keberatan bahwa demokrasi merupakan budaya barat dan tidak sesuai untuk diterapkan di seluruh dunia. Demokrasi adalah konsep yang asing untuk mereka. Di dalam prosesnya, mereka sering kali menggunakan referensi dari sejarah imperialisme Eropa, dan berkomentar bahwa negara-negara Eropa ini meninggalkan warisan demokrasi yang meragukan ketika mereka mundur dari daerah-daerah koloninya. Menurut keberatan ini, penegakan demokrasi hanya dilakukan untuk membuka akses dengan tujuan menjamin dominasi ekonomi pasar Barat di beberapa negara. Siapapun yang menyetujui pandangan ini tidaklah tertarik untuk memperbaiki dan menstabilkan demokrasi, dan mereka lebih mudah direkrut rezim-rezim otoriter.

Pemikiran ini jelas-jelas berprasangka terhadap sifat, sasaran dan kemungkinan demokrasi serta mengindahkan kondisi dan konflik kepentingan yang berkontribusi kepada lahirnya demokrasi di Eropa. Dalam diskusi tentang penguasa politik abad 20, terutama di Asia Tenggara pada tahun 1980-an dan 1990-an, mereka juga mengemukakan keberatan tentang demokrasi. Secara umum, semua ini terkait dengan batasan-batasan yang sama terhadap berlakunya hak asasi manusia secara umum.

Agar dapat menjawab pertanyaan ini, pertama-tama kita harus membuat perbedaan antara sejarah asal mula demokrasi dan validitas praktisnya. Seperti halnya pencapaian-pencapaian budaya Timur yang kemudian diakui dan diyakini di seluruh dunia, pencapaian dari Barat juga dapat digunakan di bagian dunia yang lain dan memperoleh pengakuan karena memang pencapaian itu sukses dan meyakinkan. Asal mula sebuah penemuan, termasuk penemuan lembaga-lembaga sosial politik, tidak menentukan validitas dari penemuan tersebut.

Dalam konteks demokrasi, beberapa budaya mengklaim bahwa demokrasi sudah mereka praktekkan sejak lama. Misalnya seperti resolusi konflik di tradisi Afrika yang dilakukan dengan mengadakan dialog bersama dengan semua orang dewasa di suku tersebut, atau sistem otonomi di Asia Selatan dan Tenggara. Di Yunani pada abad ke-5 SM, demokrasi secara historis mengalami popularitas pertamanya. Hal ini hanya berlaku dalam periode yang singkat dan sesuai dengan konteks budaya pada masa tersebut, yaitu tidak melibatkan perempuan, orang asing dan budak.

Namun demikian, demokrasi dalam prakteknya tidak memainkan peranan apapun di dalam sejarah panjang negara-negara Barat sejak penyebaran ajaran Kristen (sejak abad ke-4) sampainya berkembangnya kelompok borjuis di abad ke-18. Demokrasi tidak hidup di “Barat” baik dalam bentuk norma ataupun praktek selama kawasan ini didominasi oleh agama Kristen. Bahkan, pada masa tersebut terdapat perbedaan tingkatan hak dan jaminan partisipasi untuk kelompok-kelompok

dengan status sosial yang berbeda. Akan tetapi, keadaan ini juga berlaku di dalam budaya lain, dan di Barat, kondisinya sangat jauh dari demokrasi.

Hal yang menjadi karakteristik demokrasi dan penting untuk kita pahami adalah ranah pengaruh demokrasi pada awalnya bukanlah bagian integral dari budaya Barat. Demokrasi pertama kali muncul di permukaan dengan adanya momen bersejarah ketika budaya homogenitas Barat hampir berakhir. Demokrasi adalah sebuah penemuan kreatif yang secara produktif terkait erat dengan perkembangan baru dan bukanlah hasil dari program pembangunan "genetik" budaya Barat.

Berikut ini adalah empat perkembangan baru yang pada akhirnya membuat demokrasi diakui dan diterima sebagai solusi satu-satunya untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam hidup bermasyarakat:

1. Pembangunan kota-kota besar dimana orang-orang dari berbagai budaya dan agama berkumpul dan belajar untuk saling memahami dan menghormati.
2. Menurunnya masyarakat feodal yang statis dan berorientasi agraris lalu secara bertahap digantikan oleh dinamika ekonomi perdagangan, keahlian dan industri. Para warga negara berjuang untuk memiliki pengaruh di kehidupan ekonomi dan sosial serta pengaruh untuk membentuk politik yang semakin penting.
3. Perbedaan di dalam tradisi agama itu sendiri. Setidak-tidaknya sejak abad ke-16 terlihat bahwa tradisi keagamaan yang sama dapat terus berkembang dan

mempertahankan keberadaannya yang memiliki arah yang jauh berbeda bersama-sama dengan perubahan kondisi kehidupan sosial. Di masa lalu, agama menjamin persatuan politik, sekarang menjadi sumber utama perbedaan dan konflik.

4. Pembangunan ekonomi dengan segala moderenisasinya membutuhkan ruang untuk mengembangkan inisiatif-inisiatif dan pemenuhan kondisi dasar yang layak untuk peserta.

Dengan masuknya abad Pencerahan di abad ke-18, interaksi perkembangan-perkembangan ini menghasilkan cara pandang dan gerakan politik baru. Pada masa tersebut diakui bahwa penegakan HAM dan demokrasi di dalam negara menjadi satu-satunya kemungkinan untuk memenuhi beranekaragam kebutuhan untuk semua orang dengan cara yang diakui bersama. Demokrasi dan HAM menawarkan solusi yang paling meyakinkan untuk masalah baru yang muncul sebagai akibat dari keanekaragaman agama dan sosial serta dinamika perkembangannya. Hanya ketika budaya Barat yang didominasi oleh budaya Kristen memasuki era moderen, dengan dibentuk oleh pluralisme dan dinamika pembangunan, demokrasi kemudian diakui sebagai model pengorganisasian politik swadaya di masyarakat.

Demokrasi bukanlah spesialisasi budaya Barat, namun lebih merupakan cara terbaik untuk menyelesaikan konflik kepentingan yang dihadapi dalam proses menuju moderenisasi.

Alasan lahirnya demokrasi moderen ini memberikan kejelasan bahwa demokrasi tidak diprogramkan sebelumnya sebagai cerminan budaya Barat, namun merupakan cara baru untuk mengatasi masalah-masalah yang orisinil:

- Dengan cara apa masyarakat dapat mencapai ketertiban sosial secara umum dan aksi-aksi bersama yang dibentuk atas dasar kepentingan, keyakinan beragama dan nilai-nilai yang berbeda?
- Bagaimana aturan politik dapat secara efektif memiliki hubungan dengan kepentingan, nilai dan opini orang-orang yang seharusnya mengambil tindakan?
- Bagaimana semua orang bermartabat yang hidup bersama di dalam masyarakat diandalkan untuk mengekspresikan dirinya?

5. Konflik, Konsensus, Kompromi

Konflik, sebagai bentuk konfrontasi antar perbedaan kepentingan baik di tingkat daerah, sosial, ekonomi, budaya, agama atau etis, merupakan suatu titik awal yang tidak dapat dihindari di masyarakat bebas manapun. Konflik adalah komoditas dan dasar politik. Agar konflik dapat diselesaikan secara demokratis, ada kebutuhan adanya konsensus dasar dan kesadaran untuk mencapai kompromi di setiap demokrasi. Setidak-tidaknya konsensus harus tercapai dalam nilai-nilai dasar konstitusi, mis. hak-hak dasar, proses pengambilan keputusan yang demokratis, dan tujuan-tujuan mendasar lainnya yang penting bagi keseluruhan bagsa sebagai sebuah entitas politik.

Proses konsensus. Dalam pemaknaan secara sempit, *konsensus* berarti kesepakatan penuh yang diambil oleh sejumlah peserta dan kelompok-kelompok peserta tentang isu-isu tertentu yang terkait dengan kepentingan, program politik dan aksi-aksi yang diharapkan oleh mereka. Konsensus diperlukan oleh komunitas politik di dalam *proses* menangani konflik, hak-hak dasar yang secara implisit berlaku untuk setiap orang, dan beberapa tujuan nasional yang harus terus diperjuangkan di setiap resolusi konflik. Dalam pemikiran ini, konsensus secara umum adalah bagian inti dari konstitusi politik yang berlaku pada saat itu dan di dalam budaya politik yang ada.

Konflik. Di banyak budaya konflik memiliki konotasi negatif dan cenderung dihindari sebagai fitur yang mendampingi politik. Sebenarnya konflik adalah ekspresi kebebasan langsung dan

unsur produktif dari pemahaman politik. Tanpa adanya ekspresi yang jelas dari kepentingan dan sasaran politik yang berbeda-beda, lawan-lawan politik tidak akan memiliki kesempatan untuk memasuki proses pembentukan opini politik dan tujuan politik. Selain itu, publik tidak berkesempatan untuk mengetahui sejauh mana mereka diperhitungkan di dalam penyelesaian permasalahan.

Konflik memiliki fitur khusus untuk menampilkan beberapa kemungkinan-kemungkinan alternatif, perspektif lain dan aksentuasi-aksentuasi lain yang mewakili kepentingan dan nilai-nilai yang ada. Dengan demikian, konflik membantu mempromosikan kebebasan melalui proses pembelajaran di masyarakat, memberikan kesempatan kepada individu-individu untuk menentukan opini mereka sendiri, dan untuk pembangunan masyarakat seutuhnya.

Konflik tanpa konsensus dasar akan memiliki dampak yang menghancurkan. Konsensus tanpa memberikan kesempatan untuk terjadinya konflik juga akan melumpuhkan dan menghambat demokrasi. Hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya depolarisasi di dalam negara.

Inti dari budaya politik demokratis adalah interaksi yang produktif antara konsensus dan konflik. Diperlukan sebanyak mungkin konsensus untuk mencegah agar konflik

tidak menghancurkan dasar-dasar hidup bermasyarakat dan pengakuan akan proses resolusi yang damai dan adil. Akan tetapi konflik juga diperlukan untuk menjamin kebebasan dan ruang berekspresi untuk semua kepentingan sosial yang sah.

Kompromi yang adil merupakan salah satu proses yang paling produktif untuk mengatasi konflik atas dasar konsensus, dimana cara ini diterima oleh semua pihak melampaui aturan, sasaran, dan hak-hak dasar yang dimiliki setiap orang di masyarakat. Kompromi menegakan kembali konsensus dasar yang ada, memberikan ruang untuk terjadinya konflik, dan menunjukan bagaimana kepentingan banyak pihak dapat turut dipertimbangkan di dalam kerangka kerja ini.

6. Demokrasi yang Melekat

Kesalahpahaman yang sudah sejak lama hadir dan telah ditolak mentah-mentah oleh teori maupun praktek demokrasi moderen adalah bahwa demokrasi berarti keputusan-keputusan penting yang menyangkut masyarakat secara absolut berada di tangan kelompok mayoritas. Demokrasi yang berfungsi menurut prinsip dasar seperti ini akan segera kehilangan peranannya karena beberapa alasan. Hal ini karena demokrasi hanya dapat bertahan apabila hak-hak dasar rakyat tidak diserahkan sebagai bagian dari keputusan kelompok mayoritas. Jika tidak, kelompok mayoritas yang ada dapat membatasi kemungkinan-kemungkinan aksi sosial dan politik kelompok minoritas dengan berbagai cara sehingga kelompok minoritas tidak akan pernah berkesempatan menjadi kelompok mayoritas. Dengan demikian, prinsip mayoritas yang ketat menjadi salah satu cara yang dapat menghapuskan demokrasi.

Akan tetapi, ada beberapa alasan tambahan mengapa prinsip mayoritas yang tidak terbatas pun dapat dianggap tidak "demokratis." Berikut ini adalah alasan-alasan yang paling penting yang berakibat pada kehancuran "demokrasi murni":

- *Kurangnya legitimasi karena sering kali mengindahkan berbagai kepentingan dan nilai-nilai yang sah di masyarakat.*
- *Pembatasan kemampuan politik kelompok minoritas karena sebagai pihak mayoritas mereka dapat membatasi atau bahkan menghilangkan hak-hak politik dasar*

(kebebasan berkumpul, kebebasan berserikat, kebebasan berekspresi).

- *Kurangnya keberhasilan karena pihak minoritas yang dikalahkan tidak dapat mengakui nilai-nilai apapun yang dianut dalam tujuan demokrasi pihak mayoritas, apabila kepentingan mereka dikesampingkan seluruhnya dari keputusan-keputusan kelompok mayoritas yang berkuasa.*
- *Kurangnya stabilitas. Hal ini terjadi karena pihak minoritas, yang tidak diperhitungkan, akan mengupayakan cara-cara lain agar diperhitungkan baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang dan menolak memberikan loyalitas mereka untuk demokrasi jenis ini.*

Dengan demikian, demokrasi sebagai prinsip mayoritas harus **melekat** di dalam setiap kondisi yang ada agar dapat membangun keabsahannya dan menjamin stabilitasnya. Terutama dalam hal-hal:

1. Nilai hak-hak dasar individu yang independen dan tidak dibatasi.
2. Masyarakat sipil yang aktif untuk menjamin kesinambungan partisipasi warga negara dalam kehidupan politik.
3. Sistem hukum yang berfungsi agar dapat menjamin implementasi hak-hak seluruh individu.
4. Budaya politik yang demokratis yang mensejajarkan aksi-aksi masyarakat dan elit politik dengan hukum dan aturan-aturan demokrasi.

Di satu sisi, seluruh kondisi dasar ini membatasi prinsip demokratis tentang keputusan mayoritas, namun, di sisi lain, kondisi-kondisi ini menyeimbangkan kesetaraan hak-hak dasar setiap individu, dan memberikan legitimasi, efektifitas dan ketetapan terhadap hak-hak tersebut.
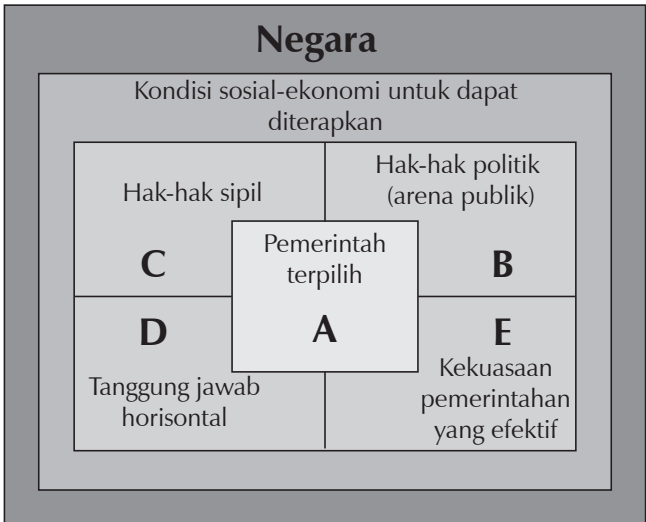
Ilustrasi: Demokrasi yang Melekat

7. Tipe-tipe Konflik dan Bentuk-bentuk Kompromi

Konflik merupakan kondisi dasar dalam suatu permasalahan politik. Dengan kata lain, konflik mencerminkan seluruh aspek dasar ketidaksepakatan politik yang dialami peserta. Dalam hal ketidaksepakatan, konflik politik melibatkan kepentingan-kepentingan yang memerlukan regulasi politik, dan dengan demikian tidak dapat dicegah atau dihindari melalui alternatif-alternatif individu. Oleh karena permasalahan politik harus selalu diselesaikan untuk kepentingan semua orang melalui lembaga-lembaga yang kompeten, ketidaksepakatan tentang kepentingan akan selalu menjadi konflik yang pertama kali muncul.

Konflik dapat berkembang ke semua bidang yang melibatkan kepentingan politik, seperti misalnya di bidang ekonomi, sosial, budaya dan regional. Dalam hal ini, politik dapat dilihat sebagai proses resolusi konflik kepentingan yang damai dan integratif.

Tipe-Tipe Konflik

Empat bentuk dasar konflik sangatlah menarik untuk dipelajari untuk dapat memahami proses politik dan mencari kemungkinan tercapainya kompromi yang baik.

1. *Asal mula perbedaan*. Konflik dapat muncul pada *asal mula perbedaan* timbul dengan cara mengkaji pertanyaan-pertanyaan tentang kepentingan bersama yang nantinya dapat menghasilkan konsensus melalui dialog intensif yang

bertujuan untuk mencapai pemahaman bersama, seperti isu tentang menentukan hari libur nasional atau menerapkan tarif pajak. Di banyak kasus, ada kemungkinan untuk memulai proses diskusi publik tentang nilai-nilai dasar masyarakat dengan keterlibatan seluruh peserta untuk mengatasi konflik, mis. tentang batas-batas kebebasan setiap orang, implementasi keadilan sosial, dan keamanan kemampuan bertahan hidup jangka panjang, dimana peserta merubah interpretasi dasar mereka dan memilih argumen yang lebih baik. Dengan cara ini, kepentingan bersama dapat didefinisikan bersama oleh peserta karena mereka meyakininya.

Perubahan seperti ini, dari yang pada awalnya adalah konflik politik menjadi konsensus setelah melalui proses negosiasi yang panjang dan melelahkan untuk menimbang keuntungan dan kerugian yang ada, pada umumnya hanya dapat ditemukan dalam pertanyaan-pertanyaan dasar yang terkait dengan masyarakat dan jarang sekali terkait dengan kepentingan ekonomi, sosial dan perbedaan budaya.

2. *Konflik yang dimenangkan secara parsial.* Konflik jenis ini hadir ketika ada sejumlah sumber daya yang harus dialokasikan ke berbagai kelompok sosial dan ekonomi untuk digunakan dengan berbagai alasan, seperti distribusi Produk National Bruto. Dalam situasi ini, jumlah sumber daya yang sama dikurangi di satu pihak dan ditingkatkan untuk pihak lain. Resolusi konflik kepentingan dapat dilakukan melalui negosiasi dimana tiap-tiap individu

mencapai kompromi melalui pertukaran ancaman yang terkait dengan kerugian-kerugian yang mungkin dialami oleh satu pihak atau dengan menawarkan kepada pihak tersebut keuntungan-keuntungan tertentu. Namun kompromi juga dapat diraih melalui keputusan mayoritas, dimana hal ini yang biasanya terjadi dalam proses politik, dengan tetap mempertimbangkan kepentingan minoritas. Dalam demokrasi satu pihak harus tetap mengusahakan agar hasil akhirnya dapat diterima oleh semua orang, karena sejumlah kompromi telah dicapai dalam keputusan tersebut atau karena proses pengambilan keputusannya dilakukan secara non-partisan dan juga dapat memberikan manfaat kepada kelompok minoritas pada kesempatan berikutnya. Legitimasi proses pengambilan kepu-tusan yang demokratis biasanya dihasilkan dari jaminan bahwa pihak minoritas yang ada memiliki kemungkinan untuk menjadi pihak mayoritas pada kesempatan berikutnya melalui argumen-argumen yang meyakinkan dan mobilisasi tekanan politik, dan untuk alasan ini, maka akan selalu ada prospek di masa depan untuk menghasilkan resolusi dari konflik yang ada saat ini demi keuntungan pihak minoritas yang ada saat ini.

3. *Konflik yang dimenangkan satu pihak.* Konflik ini hadir ketika satu-satunya solusi yang dapat dipikirkan adalah dengan memenuhi kepentingan satu pihak seutuhnya, seperti yang ada dalam bentuk pemerintah – negara monarki atau republik, negara sekuler atau religius – sehingga kepentingan pihak lain tidak dipertimbangkan sama sekali. Konflik seperti ini

tidak sering terjadi dalam kehidupan politik. Dalam situasi tertentu, konflik seperti ini melibatkan isu-isu tentang nilai dan kepentingan berdasarkan agama, dimana individu-individu dianggap tidak memiliki kesempatan apapun untuk memutuskan, atau hanya menyangkut isu-isu tertentu yang karena sifat dari isu tersebut, yang tidak mewakili kepentingan mereka pada saat itu, atau bahkan tidak sama sekali.

Bahkan dalam kasus konflik yang bersifat 'menangkan semua atau tidak sama sekali', biasanya tetap ada kemungkinan untuk mengisolir akar konflik yang paling kontroversiaal sehingga satu permasalahan dapat diselesaikan dengan cara kompromi atau konsensus. Dengan konflik jenis ini, seni berpolitik adalah untuk mengisolir akar permasalahan yang paling kontroversial semaksimal mungkin dari keputusan yang mengikat semua pihak sehingga semua pihak yang berkonflik dapat diselamatkan dan tidak terjebak dalam situasi dimana mereka sendiri memiliki pemahaman yang sangat terbatas tentang hal-hal yang paling esensial dan bagi mereka konflik tersebut tampak tidak dapat terselesaikan.

4. *Konflik yang memenangkan semua pihak*. Konflik ini hadir ketika setelah semua pihak melalui proses pertimbangan yang seksama tentang asal mula perbedaan kepentingan menemukan bahwa ada kemungkinan-kemungkinan untuk menghasilkan resolusi yang dapat dimenangkan semua pihak; solusi yang menguntungkan semua pihak (win-win

solution) mungkin dicapai. Hal ini dapat terjadi ketika ada permasalahan dalam menentuka personil di perusahaan. Situasi awal yang tampak seperti konflik yang berpihak pada satu pihak, dimana perwakilan pekerja ingin memiliki hak untuk memutuskan segala sesuatu bersama-sama, sementara perusahaan mempertahankan haknya untuk memutuskan sendiri. Dalam proses diskusi, bentuk penentuan bersama ini dapat dipenuhi apabila dapat meningkatkan produktifitas perusahaan, karena pekerja lebih termotivasi dan mau menggunakan pengetahuan serta pengalaman mereka and untuk memajukan perusahaan.

Konflik dan Kompromi. Dalam analisa akhir, seni berpolitik melibatkan sebanyak mungkin penyelesaian konflik kepentingan melalui konsensus dan kompromi, dan, hanya dalam beberapa pengecualian, lalu menggunakan keputusan mayoritas untuk menentukan beberapa kepentingan tertentu. Resolusi konflik merupakan dampak dari menciptakan konsensus karena dengan demikian dapat memperkuat kembali keyakinan seseorang tentang nilai-nilai demokrasi dasar dan proses pengambilan keputusan. Untuk beberapa jenis situasi konflik ‘menangkan semua atau tidak sama sekali’, yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan politik, penting sekali untuk dicamkan bahwa keputusan-keputusan ini harus memiliki kesempatan untuk dirubah nantinya demi demokrasi.

8. "Kompromi yang Malas atau Setengah Hati" – Bentuk dan Alasan

Di berbagai negara dan kelompok sosial, kompromi politik memiliki reputasi yang buruk meskipun semua orang mengetahui bahwa dalam kehidupan pribadi mereka, kompromi adalah suatu hal yang normal dan dilakukan secara umum dalam keluarga mereka, saudara-saudara, dan kehidupan bermasyarakat sebagai cara untuk menemukan solusi.

Penilaian yang buruk terhadap konlik politik memiliki beberapa alasan. Alasan pertama adalah di dalam *budaya politik otoriter* masyarakat terbiasa dengan situasi pihak yang berkuasa memiliki kemampuan memaksakan kepentingan mereka tanpa berkompromi. Selama situasi ini dianggap sebagai cerminan kekuatan penguasa, maka kompromi politik akan segera dicap sebagai suatu hal yang bertentangan, melanggar aturan dan indikasi kelemahan.

Alasan kedua yang mengakibtkan kompromi politik memiliki citra negatif adalah karena masyarakat tidak memiliki cukup pengalaman yang terkait dengan hal tersebut. Hal ini terjadi karena sering kali peserta politik, melakukan kompromi yang tidak baik atau patut dipertanyakan. Jika sebuah partai ketika berkampanye menjanjikan untuk menghapus uang kuliah ketika mereka terpilih, namun kemudian menjauh dari klaim ini tanpa alasan yang jelas, maka oleh masyarakat mereka akan dianggap melakukan "kompromi yang malas" atau setengah hati. Alasan mengapa mereka menjanjikan hal itu adalah karena mereka

ingin memenangkan keikutsertaan individu-individu terkemuka dalam kekuasaan dan pemerintahan mereka dan membentuk pemerintah mayoritas, mitra kondisi ini merupakan prasyarat untuk berkoalisi.

> **“Dalam sebagian besar situasi, kompromi yang malas atau setengah hati merupakan bentuk pengkhianatan terhadap sasaran, nilai dan kepentingan yang diyakini peserta dengan tujuan untuk memenuhi sasaran lain yang benar-benar berbeda dan cenderung mau menang sendiri, dimana hal ini tidak dapat dibenarkan.”**

Sering kali di dalam politik, terutama ketika demokrasi belum benar-benar terbangun, banyak sasaran-sasaran yang digaungkan selama kampanye pemilu kemudian dikorbankan hanya karena kepentingan egoistis politisi untuk berkuasa dan menduduki jabatan. Jika “pengkhianatan” seperti ini kemudian dinyatakan sebagai kompromi yang perlu dilakukan sementara tidak ada alasan pembenaran apapun terhadapnya, maka kompromi sebagai strategi politik seperti ini akan dipahami publik sebagai upaya menyembunyikan pengkhianatan politik.

Karakter “kompromi yang malas atau setengah hati“ yang ditampilkan di hadapan publik dapat dengan segera dan secara efektif mendiskreditkan keseluruhan konsep “kompromi“ di jangka panjang, termasuk untuk penggunaan istilah itu sendiri,

terutama apabila tidak ada contoh positif yang dapat menjadi kontra penyeimbang yang efektif.

9. Kompromi – Realisasi Idealisme di Dunia Nyata

Seorang filsuf Jerman *Leonard Nelson* menyebut kompromi yang baik sebagai *Realisasi Idealisme di Dunia Nyata.* Bahkan perkiraan untuk mendekati sasaran ideal hanya mungkin terjadi terjadi dalam bentuk kompromi.

Setiap manusia mengetahui dari kehidupan pribadi mereka sendiri bahwa sasaran ideal tidak dapat sepenuhnya dicapai dalam kondisi dunia saat ini. Hampir semua orang juga mengetahui bahwa hal ini terjadi tidak hanya karena sumber daya yang ada terbatas sementara sasaran ideal cenderung tak terbatas. Namun di balik semua hal trivial ini, kenyataan bahwa dua peserta atau lebih tidak pernah memiliki sasaran yang benar-benar sama juga memiliki peranan yang menentukan di masyarakat. Akan selalu ada perbedaan diantara mereka, baik kecil ataupun besar, meskipun tidak ada bentuk oposisi yang meluas. Namun demikian, perbedaan sasaran secara total juga mungkin terjadi. Karena sasaran dari beberapa orang tidak akan pernah sejalan seutuhnya, kompromi hampir selalu menjadi hal yang penting dalam bekerjasama. Dan karena bisa dikatakan bahwa pertentangan penuh antara sasaran orang-orang sangat jarang terjadi, maka kompromi hampir selalu mungkin dilakukan.

Sebagai contoh, jika sebuah partai yang memenangkan kekuasaan pemerintahan dan menjadi partai mayoritas di suatu negara, selama berkampanye menjanjikan untuk melakukan

moderenisasi sistem pendidikan dan membangun infrastruktur negara, partai ini tidak akan memiliki sumber daya yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan dalam dua bidang yang memerlukan biaya besar ini. Dalam situasi ini, maka partai harus mencapai kompromi antara dirinya dan berbagai kelompok pemilih, dimana, seperti halnya dengan kompromi lain, tidak membahas pilihan 'semua atau tidak sama sekali', namun lebih ke pembagiannya. Sebagian sumber daya ini akan diinvestasikan ke dalam sistem pendidikan dan sebagian lagi untuk pembangunan infrastruktur. Di kedua bidang ini, pembangunannya akan jauh tertinggal dari harapan, namun kita tetap dapat melihat kemajuan-kemajuan yang dihasilkan di dalam bidang tersebut.

Akan tetapi, apabila sebuah partai hanya dapat membentuk pemerintahan koalisi dengan bantuan partai lain tergantung pada sistem pemilihan yang digunakan dan hasil pemilu, maka sudah jelas bahwa kompromi harus dicapai dalam hal-hal yang terkait dengan perbedaan kepentingan dan sasaran kedua mitra ini. Hal ini hanya dapat diperoleh di dalam situasi yang saling 'memberi dan menerima'. Dalam skenario terbaik, masing-masing partai yang berpartisipasi dapat mencapai sasaran terpenting yang mereka harapkan, sementara mereka juga harus menerima pencapaian hasil dari pihak lain di bidang lain sebagai timbal balik, yang tidak kalah pentingnya. Sebagai contoh, jika salah satu dari dua partai menjanjikan pemilih untuk menghubungkan semua desa-desa di negara tersebut dengan jalan raya, namun setelah duduk di pemerintahan ternyata sumber daya yang ada mencukupi atau bahkan tidak ada sama sekali bagi kedua

partai ini, karena mungkin formasi pemerintahan mayoritas tidak setuju dengan sasaran ini karena ada sasaran lain yang lebih penting seperti pembangunan sektor pertanian, maka kemajuan perlahan-lahan yang dapat diverifikasi yaitu menghubungkan sejumlah desa ke jaringan jalan raya diterima sebagai kompromi yang dapat dibenarkan.

Partai ini lalu dapat menunjukan bahwa mereka sudah satu langkah lebih dekat ke sasaran mereka meskipun tidak dapat langsung mencapainya. Kompromi seperti ini dapat dibenarkan selama ada alasan yang baik. Dengan demikian, kompromi ini dapat dikomunikasikan secara politik dengan cara yang meyakinkan. Hal ini merupakan faktor yang paling menentukan dalam kompromi manapun.

Kompromi dapat diterima, dipercaya dan realistis dalam mengejar sasarannya hanya apabila ada alasan yang baik yang sejalan dengan sasaran dan janji-janji awal dari peserta.

Apabila sebuah partai menolak setiap bentuk kompromi yang dilakukan oleh pemerintah karena alasan ketidaksukaan, maka kemungkinan justru semakin sedikit sasaran mereka yang dapat dicapai, atau, dalam situasi yang meragukan, tidak ada sasaran yang diperoleh sama sekali, tergantung pada situasi politiknya. Dalam situasi-situasi ini, kompromi yang dihasilkan merupakan kemungkinan terdekat untuk mencapai sasaran ideal.

Penolakan suatu pihak untuk menghasilkan kompromi dapat dilihat sebagai pengkhianatan sasaran ideal karena pihak tersebut kehilangan kesempatan aktual yang mungkin diperoleh untuk mencapai sasarannya.

10. Kompromi dan Kepercayaan

Penelitian empiris telah sekali lagi telah menunjukan bahwa di berbagai budaya di dunia, *kepercayaan* merupakan salah satu unsur yang paling penting dalam demokrasi. Dalam konteks politik, kepercayaan yang dimaksud disini terdiri dari tiga hal:

- Jaminan bahwa hampir semua orang, yaitu orang-orang yang terkait dengan kehidupan masyarakat atau publik, bersedia menyuarakan kekhawatiran masyarakat secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab atas tindakannya.
- Harapan bahwa kesepakatan yang mengikat tetap dipenuhi.
- Dan terutama: asumsi bahwa kedua sikap ini diterapkan secara luas oleh semua orang tanpa melihat perbedaan jender, warisan etnis, asal daerah, kelompok sosial, pekerjaan atau afiliasi agama.

Hanya apabila rasa percaya ini hadir dalam jumlah yang cukup maka budaya demokrasi dapat berkembang dan menjadi dasar tindakan manusia, dimana hal ini merupakan dasar dari lembaga demokratis yang berfungsi dengan baik.

Hal ini tidak hanya berlaku untuk hubungan dengan berbagai lembaga dan kelompok kepentingan, namun juga pada kegiatan-kegiatan internal dalam organisasi sosial apapun. Baik dalam partai politik, serikat pekerja, asosiasi industri, organisasi non-pemerintah, atau klub sepak bola: semakin anggota dan

pesertanya tidak bersedia untuk bekerjasama dalam masyarakat, maka bahayanya akan semakin besar dan cepat atau lambat akan berakibat pada perpecahan, hal ini hanya dapat dihentikan, atau tidak sama sekali, melalui kerja keras. Sesekali perpecahan tidak dapat dihindari apabila sasaran di dalam kelompok atau asosiasi telah bergeser jauh sehingga konsensus minimum sudah tidak mungkin dihasilkan. Namun demikian, alasannya bukanlah karena kurangnya keinginan berkompromi. Perpecahan yang terjadi atau ditimbulkan karena semua pihak tidak mau saling mengerti tidak akan memperkuat, namun justru akan melemahkan sasaran satu pihak. Prinsip matematika bahwa dua atau tiga lebih besar dari satu tidak selamanya valid di dalam konteks masyarakat.

Kompromi memainkan peranan kunci dalam kepercayaan sosial. Di satu sisi, hal ini mensyaratkan bahwa semua pihak berasumsi bahwa pihak-pihak lain akan mematuhi aturan yang ditentukan dalam kompromi, meskipun mereka tidak selamanya menyukai aturan tersebut. Jika harapan ini hilang, maka biasanya hanya tinggal sedikit keinginan untuk berkompromi. Di sebagian besar kondisi, ketidakpercayaan mengakibatkan satu pihak berupaya mengalahkan pihak lawan dan memaksa pihak lawan untuk mematuhi perjanjian yang hanya mewakili kepentingan pihak tersebut dengan asumsi bahwa lawan akan melakukan hal yang sama apabila berada di posisi mereka.

Perilaku seperti ini seing kali dihasilkan dari pepatah yang berpandangan sangat sempit yaitu bahwa seseorang harus menciptakan keberuntungannya sendiri dan mengambil apapun

yang ada di hadapannya sebelum segalanya berubah dan ia kehilangan segalanya. Di sisi lain, kompromi menciptakan rasa percaya begitu dihasilkan dan semua pihak yang terlibat akan mematuhi kesepakatannya. Kompromi membangun reliabilitas di berbagai kasus.

Ketika mencapai kompromi menjadi suatu kebiasaan dan melahirkan pengalaman dimana mitra-mitra yang berpartisipasi mematuhi kesepakatannya meskipun di beberapa hal bertentangan dengan kepentingan mereka sendiri, maka hubungan berdasarkan kepercayaan akan lahir dan berkembang diantara para mitra melalui tindakan-tindakan mereka.

Hubungan berdasarkan kepercayaan ini akan mengarah kepada harapan positif bahwa pergantian pemerintah bukanlah suatu bencana karena di dalam situasi ini tampaknya tidak mungkin pihak lain akan menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk memaksakan kepentingan mereka dan secara terang-terangan meniadakan aturan yang mengatur mereka untuk menghormati hak-hak minoritas dan tidak mengikutsertakan mereka dalam kebijakan-kebijakan.

Sikap dasar demokratis lahir dari keadaan yang melihat bahwa perubahan posisi antara oposisi dan pemerintah sebagai suatu hal yang normal dan dapat diterima. Pengetahuan yang

diterima adalah, dalam situasi terbaik, suatu partai hanya dapat membentuk pemerintahan dalam satu periode tertentu dan setelah itu mengambil peran opisisi. Dengan demikian, peranan oposisi harus dihormati dan dihargai secara membangun dan bukan dilihat sebagai upaya melawan pemerintah yang ada dengan cara apapun.

Menjalankan prinsip perubahan antara oposisi dan pemerintah tanpa adanya penyalahgunaan kekuasaan untuk memaksakan kepentingan atau pelanggaran hak dari partai yang berkuasa di pemerintahan, merupakan salah satu sumber yang paling penting untuk pembangunan budaya demokrasi atas dasar kepercayaan. Setelah demokrasi diciptakan, maka mereka juga dapat menghadapi krisis dan konflik-konflik berat. Ketika demokrasi hampir tidak ada, maka ada kecenderungan konflik dan krisis akan meningkat ke perselisihan berat untuk mendapatkan 'semua atau tidak sama sekali', dan ketidakpercayaan peserta dan partai satu sama lain akan semakin besar. Spiral membangun kepercayaan dan spiral ketidakpercayaan memiliki kecenderungan untuk memperkuat diri sendiri. Spiral kepercayaan tumbuh ketika kebiasaan dan kepercayaan yang ada mendukung dan memeliharanya. Spiral ketidakpercayaan cenderung bergerak menurun ketika peserta berhenti meneruskan upaya mereka untuk menjaga kepercayaan pihak lain terhadap tindakan mereka.

Kompromi politik yang baik merupakan cara yang mengagumkan untuk membangun kepercayaan dan secara bertahap membiarkannya tumbuh dan menjadi resolusi yang diterima oleh semua pihak melalui pengalaman loyalitas mereka bersama.

Ini adalah alasan mengapa kompromi juga disebut sebagai sekolah demokrasi lanjutan. Kita juga dapat memutar frase ini dan mengatakan bahwa demokrasi merupakan sekolah lanjutan kompromi.

11. Kompromi – Kesempatan Stabilitas

Sebagai tambahan dari hal-hal lain, demokrasi juga memiliki dua aturan tidak tertulis:

1. Partai manapun yang memegang kekuasaan dan kendali pemerintahan, hak-hak dasar setiap orang harus tetap dijamin dan berbagai kepentingan-kepentingan sebisa mungkin harus diintegrasikan ke dalam proses pengembangan tujuan.
2. Partai manapun yang memerintah, harus ada cukup ruang untuk aksi politik dan aksi sosial dari siapapun untuk memperoleh dukungan dari orang-orang yang satu pikiran dengan prospek menjadi pihak mayoritas di dalam pemilu berikutnya lalu menguasai pemerintahan.

Apabila dinilai dari kacamata standar kekuasaan politik otoriter dan budayanya yang kuno, aturan-aturan ini tampak seperti peryataan lemah atau kurang cerdas karena sudah jelas bagi semua orang bahwa siapapun harus menggunakan kekuasaan politik yang tersedia untuk mereka sebanyak mungkin.

Namun, di dalam kondisi moderen dimana tidak ada lagi kekuasaan politik yang memiliki kesakralan religius, yang dapat memaksakan setiap orang bahkan orang-orang yang berada di luar batas kesucian mereka untuk patuh karena ikatan agama, maka aturan-aturan otoriter “semua atau tidak sama sekali“ menjadi sangat tidak produktif bagi semua peserta. Jika satu

kelompok memonopoli semua hal dalam periode singkat, maka kelompok tersebut harus menyadari adanya penolakan getir dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak oposisi dengan segala macam cara untuk menjatuhkan kekuasaannya. Begitu hal ini terjadi, semua hasil yang sudah diperoleh melalui pemaksaan kehendak akan hilang atau setidak-tidaknya terancam. Ini adalah sebuah strategi yang kurang memiliki kecerdasan politik.

Dengan cara ini maka solusi-solusi produktif dari permasalahan yang ada, peraturan perundang-undangan di negara tersebut dan mengintegrasikan semua orang ke dalam pemerintahan, serta kemampuan untuk merencanakan untuk jangka panjang sehingga semua orang dapat mempersiapkan diri, atau singkatnya, suatu bentuk stabilitas yang dapat diandalkan semua orang dan dapat dipercaya untuk mengintegrasikan strategi mereka ke dalam tindakan, akan dibatasi secara permanen.

Budaya demokrasi moderen telah berkembang menjadi budaya kompromi sebagai salah satu cara memperoleh stabilitas. Selain semua keuntungan dan konsekuensi yang dihasilkan, hal ini terutama akan memberikan efek yang menstabilkan.

Jika semua peserta selalu mampu mencapai sejumlah kepentingan politik mereka tanpa harus menjadi bagian dari

pemerintahan, karena pemerintah yang berkuasa merelakan sejumlah kepentingan mereka karena pertimbangan yang cerdas, maka pada akhirnya semua orang akan menang. Stabilitas yang dihasilkan dengan cara ini mensukseskan tindakan jangka panjang yang sudah direncanakan dan menciptakan keberlanjutan karena dapat menghindari perubahan mendadak terhadap situasi-situasi politik tertentu.

Dengan demikian, hal tersebut mencerminkan kearifan kompromi yang menunjukan bahwa pada akhirnya lebih baik membatasi diri untuk meraih kepentingan sendiri daripada nantinya terjebak ke dalam perebutan ‘semua atau tidak sama sekali’ yang konsekuensinya akan selalu sama: apa yang diperoleh dengan mudah, akan mudah pula hilang.

Dengan demikian kompromi adalah strategi politik yang cerdas, seksama dan penuh pertimbangan.

Mencegah eskalasi konflik merupakan salah satu aturan kearifan yang paling penting dalam kerjasama yang demokratis. Kompromi sangat sesuai dengan hal ini. Dengan bermufakat sejak awal, kompromi dapat dengan efektif menyampaikan secara simbolik dan tematik bahwa kepentingan pihak yang lebih lemah terintegrasikan ke dalam keputusan politik yang diambil. Dengan cara ini, kita dapat menghindari eskalasi dan intensitas konflik. Inilah cara membangun dasar kerjasama dan penerimaan dari semua lembaga-lembaga demokratis.

12. Budaya Kompromi Politik

Tidak ada demokrasi, seberapapun sempurnanya, yang dapat hidup dari kualitas lembaga itu sendiri. Apa gunanya hak pilih apabila banyak orang dicegah memilih melalui intimidasi atau kekerasan atau pemilih itu sendiri tidak memiliki cukup pengetahuan tentang partai-partai yang ikut dalam pemilu? Apa gunanya apabila banyak orang tidak memiliki cukup informasi untuk dapat memutuskan sendiri pilihan mereka atau apabila mereka memutuskan untuk mundur dan tidak mengikuti acara politik ini? Apakah gunanya sistem multi partai dan suara mayoritas apabila sebagian besar masyarakat berperang dan melakukan apapun untuk melawannya?

Agar lembaga-lembaga demokratis dapat memperjuangkan demokrasi dan tetap stabil, masyarakat membutuhkan budaya politik demokrasi yang kuat. Budaya politik mencerminkan keseluruhan pengetahuan yang tersedia di masyarakat, sikap alami, dan nilai-nilai moral dan etika yang terkait dengan politik.

Budaya politik dalam demokrasi secara khusus memerlukan pengembangan keterampilan dan kebiasaan berikut:

- **Pengetahuan** yang cukup tentang sistem politik, kemungkinan untuk terlibat dalam keputusan-keputusannya dan hasil yang paling penting untuk masyarakat.
- **Ikatan emosional** dan **dukungan etis** atas nilai-nilai dasar demokrasi dan lembaga-lembaga politik yang

dilahirkan darinya.

- Pemahaman aktif dan positif tentang p**eranan seseorang selaku warga negara** dan *pembagian tanggung jawab* seseorang untuk masyarakat.

Di balik orientasi dasar ini, orientasi tambahan juga memiliki nilai penting untuk demokrasi yang stabil. Budaya demokratis juga berarti **hubungan antara konsensus dan konflik, keinginan untuk mencapai kompromi yang baik**, kesepakatan tentang program-program politik karena dasar-dasar dan perdebatan sengit yang dilakukan, serta memahami kepentingan bersama sebagai situasi normal di dalam kegiatan-kegiatan politik yang ada di demokrasi.

Pendidikan politik di sekolah-sekolah, media massa, pendidikan orang dewasa, serikat pekerja dan di dalam debat-debat publik dapat memberikan kontribusi kepada budaya politik dalam demokrasi. Namun demikian, sebagian besar pekerjaan ini harus dilakukan melalui kegiatan politik warga negara, pengalaman mereka dengan lembaga-lembaga dan peserta politik, serta kerjasama mereka dengan warga negara lain.

Akan tetapi, tindakan elit politik sering kali, tanpa disengaja, memberikan kontribusi yang esensial untuk membentuk budaya politik di suatu negara. Rakyat belajar untuk menilai sistem politik dan cara kerjanya dari mereka sendiri. Panutan yang positif dan tindakan yang terpercaya dari elit politik dapat memberikan kontribusi besar pada identifikasi nilai-nilai dasar dan lembaga-lembaga yang ada dalam demokrasi,

sementara keegoisan, mau menang sendiri, korupsi dan lalai dalam tanggung jawab nantinya akan cenderung menciptakan citra negatif atas lembaga-lembaga tersebut. Untuk alasan ini, maka pihak lain yang dianggap penting di dalam demokrasi untuk memelihara stabilitas adalah para pejabat pemerintah. Dalam masa transisi dari *budaya feodal* atau *melayani* menjadi demokrasi, akan menjadi tidak masuk akal dan pada akhirnya hanya akan menjadi alasan untuk menolak demokrasi apabila suatu pihak menyatakan ingin menunggu sampai budaya politik demokratis berkembang seutuhnya sebelum mulai membangun lembaga-lembaga demokratis. Ungkapan "rakyat belum siap berdemokrasi" sering kali menjadi alasan kelompok elit untuk menolak menyerahkan demokrasi kepada rakyat.

Membentuk lembaga-lembaga demokratis sering kali menjadi cara yang paling aman untuk mengembangkan budaya politik bagi sebagian besar masyarakat. Karena seseorang baru bisa belajar berenang begitu ia sudah berada di air. Meskipun mendirikan lembaga-lembaga demokratis yang berada di bawah supremasi hukum merupakan prasyarat terbaik untuk mengembangkan budaya demokratis, namun ini bukanlah suatu bentuk jaminan untuk demokrasi. Sebagai tambahan dari pembentukan lembaga-lembaga demokratis tersebut, prasyarat terbaik untuk mengembangkan dan secara perlahan menstabilkan budaya politik demokratia adalah perilaku demokratis yang terlihat jelas dari para pejabat pemerintahan, penguasa dan kelompok politik ternama di suatu negara sesuai dengan supremasi hukum, serta pembangunan masyarakat sipil yang aktif. Apabila faktor-

faktor ini diperoleh dan pengembangannya dipromosikan, maka lahirnya budaya demokratis mungkin terjadi.

> **Kesadaran dan kebiasaan elit politik untuk mencapai kompromi yang baik dengan siapapun yang bersedia untuk berpartisipasi dalam kepentingan negara merupakan kontribusi yang esensial dalam mempromosikan budaya politik demokratis.**

Hal yang penting ditekankan adalah ini semua merupakan kompromi yang baik dan atas niat yang baik dan bukan sekedar jual beli belaka, yang hanya mengamankan kepentingan beberapa individu dan kelompok yang egois dan mengorbankan kepentingan bersama.

13. Komunikasi – Menengahi Kompromi

Bahasa kompromi juga merupakan bagian dari budaya kompromi politik. Selama bahasa politik yang digunakan antar lembaga Selama konotasi bahasa politik tetap ada, maka seseorang akan membuat komentar yang buruk tentang kompromi yang dihasilkan. Setiap kompromi akan dilihat sebagai kompromi setengah hati – tanda kelemahan, tidak penting, dan pengkhianatan.

Individu-individu yang bertanggungjawab secara politik, baik di dalam arena politik itu sendiri, di dalam jurnalisme dan di dalam sistem pendidikan harus membuat kontribusi untuk mengembangkan bahasa yang sesuai tentang kompromi untuk tujuan-tujuan demokratis. Istilah-istilah seperti “pemahaman,” “tambahan,” “kesepakatan” dan “keputusan yang adil” merupakan istilah semantik untuk kompromi politik. Agar kredibilitas tetap terjaga, hal lain yang juga penting dalam demokrasi adalah tetap menghormati siapapun atau lembaga manapun yang berada di dalam kamp politik selama terjadi perselisihan politik seperti pada masa kampanye pemilu.

Demokrasi akan sangat berhasil ketika konflik politik yang didiskusikan tidak ditanggapi dengan bahasa fundamentalis yang hanya bisa mencerca. Bahasa konflik politik juga dapat dibentuk oleh kejelasan dan kejernihan semangat demokrasi. Ketentuan bahwa seseorang harus segera mencapai kompromi hari itu juga dengan orang lain yang secara terang-terangan berbeda pendapat dengannya juga dapat menghasilkan efek disiplin.

Kesimpulan

Kompromi yang baik dan adil merupakan bagian penting dalam budaya politik demokrasi. Kompromi merupakan ekspresi kecerdasarn politik karena di jangka panjang cara ini akan mengamankan kepentingan peserta dengan lebih baik dan lebih berkesinambungan daripada menampilkan kekuasaan superioritas jangka pendek. Hal ini akan memperkuat rasa saling percaya antara peserta dan masyarakat. Serta menstabilkan demokrasi karena mereka membuat semua orang menyadari nilai-nilai praktisnya. Demokrasi membutuhkan dan memungkinkan berkembangnya budaya kompromi yang baik.

Profil Penulis

Prof. Dr. Thomas Meyer adalah Wakil Ketua Komite Penyusun Prinsip Dasar Partai Sosial Demokrat Jerman (SPD). Dia pernah menjadi Direktur Akademi Politik Friedrich-Ebert-Stiftung, Yayasan Politik tertua dan terbesar di Jerman. Setelah pensiun dari tugasnya sebagai Profesor Senior Ilmu Politik di Universitas Dortmund Jerman, sejak 2008 dia menjabat sebagai Editor Jurnal *"Neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte".* Buku terbarunya *"Was ist Fundamentalismus?* (Apa itu Fundamentalisme?) telah dicetak Penerbit Wiesbaden tahun2011. Thomas Meyer juga menulis banyak buku diantaranya: *The Concept of Social Democracy in Theory and Practice, The Theory of Social Democracy, Identity Mania.*

THOMAS MEYER
WITH LEWIS HINCHMAN
THE THEORY
OF SOCIAL
DEMOCRACY

Identity
Mania
Thomas Meyer

Thomas Meyer
Was ist
Fundamentalismus?
Eine Einführung
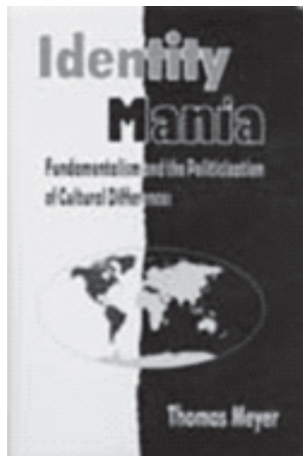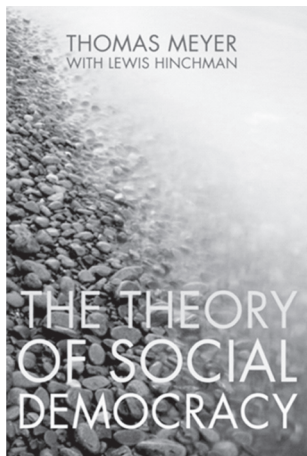
Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) adalah sebuah yayasan politik non-pemerintah dari Jerman, yang bekerja berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial. Yayasan ini berdiri tahun 1925 sebagai sebuah warisan politik dari Friedrich-Ebert, Presiden pertama Jerman yang terpilih secara demokratis. Selain di Jerman FES memiliki kantor perwakilan di 90 negara dan melaksanakan kegiatan di lebih dari 100 negara termasuk Indonesia. Kantor Perwakilan di Indonesia secara resmi berdiri sejak 1968. Sejak saat itu FES Indonesia telah menjalankan kegiatan kerjasama dengan berbagai Organisasi Non-Pemerintah/Lembaga Swadaya Masyarakat, Universitas, Lembaga Penelitian, dan Instansi Pemerintah terkait di bidang penegakan HAM, demokratisasi, pendidikan politik, fasilitasi dialog sosial, penguatan serikat pekerja, reformasi sektor keamanan, pengarusutamaan gender, dan media.

Friedrich Ebert Stiftung
Kantor Perwakilan Indonesia
Jl. Kemang Selatan II No. 2A
Jakarta 12730/INDONESIA
Telp :+62-21- 719 3711
Fax : +62-21- 7179 1358
Email : info@fes.or.id
Website : www.fes.or.id